



Research Article

Hubungan Agama Islam Dan Pengaruh Politik di Indonesia Perspektif Hasan Al-Banna

Amir Reza Kusuma¹, Elia Monika²

1. Universitas Darussalam Gontor
2. UIN Samarinda

E-mail; amirrezakusuma@mhs.unida.gontor.ac.id 



Copyright © 2024 by Authors, Published by **Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 28, 2024

Revised : September 16, 2024

Accepted : September 23, 2024

Available online : December 27, 2024

How to Cite: Amir Reza Kusuma, & Elia Monika. (2024). The Relationship Between Islam and Political Influence in Indonesia Hasan Al-Banna's Perspective. *Maklumat: Journal of Da'wah and Islamic Studies*, 2(4), 224-240. <https://doi.org/10.61166/maklumat.v2i4.31>

The Relationship Between Islam and Political Influence in Indonesia Hasan Al-Banna's Perspective

Abstract. Hasan al Banna, is one of the Islamic figures. His ideas and movements together with the Muslim Brotherhood have stimulated the fighting spirit of the Islamic community so as not to be left behind. Back to life inspired by the Qur'an and Sunnah movement. Although this Islamic renewal figure has died, his thoughts are still in the life of the Islamic community. Therefore, in political thought, Hasan al-Banna connects faith with political activity. Of course a Muslim is not perfect Islam unless he becomes a politician, who has a forward-looking view and pays full attention to issues and race. According to him, Islam must lead to attention to the problems of the nation. Islam is a

comprehensive system, covering all aspects of life. However, Islam and Indonesian Politics from time to time continue to develop and improve, of course not apart from the development of Religion and politics in Indonesia in general. Keywords: Hasan Al-banna, Islam and Politics, Indonesia.

Keywords: Islam, Politics, Hasan Al-Banna

Abstrak. Hasan al Banna, merupakan salah satu tokoh Islam. Ide-idenya dan gerakan bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin telah terangsang semangat juang masyarakat Islam agar tidak tertinggal. Kembali ke kehidupan terinspirasi oleh al-quran dan Sunnah gerakan. Meskipun ini Angka pembaruan Islam telah meninggal, pikirannya masih ada dalam kehidupan masyarakat Islam. Oleh karena itu, Dalam pemikiran politik, Hasan al-Banna menghubungkan iman dengan aktivitas politik. Tentunya seorang Muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi politisi, yang memiliki pandangan kedepan dan memberikan perhatian penuh terhadap isu-isu dan ras. Menurutnya, yang Islami harus mengarah pada perhatian terhadap masalah bangsa. Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Namun demikian Islam dan Politik Indonesia dari zaman kezaman terus berkembang dan meningkat, tentu tidak terlepas dari perkembangan Agama dan politik di Indonesia pada umumnya. Kata kunci: Hasan Al-banna, Islam dan Politik, Indonesia.

Kata Kunci: Agama Islam, Politik, Hasan Al-Banna

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal, agama membawa misi rahmatan lil alamin serta membawa konsep kepada ummat manusia mengenai persoalan yang terkait dengan suatu sistem seperti konsep politik, perekonomian, penegakan hukum, dan sebagainya. Kemudian Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat. Islam dan politik integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikian dan pola perjuangannya yang berbeda-beda, salah satu diantaranya adalah Hasan al-Banna.¹

Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi memberi isyarat tentang periodisasi perjalanan sejarah ummat Islam atau kepemimpinan politik, Pertama, periode *Nubuwwah*, yaitu masa dimana ummat Islam hidup bersama Rasulullah SAW. Kedua, periode *al-khilafata 'ala minhaji annubuwwah*, sebagaimana yang kita lihat dalam kekhilafahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.²

Ketiga, periode *al-mulkan 'adhudhan* (kepemimpinan politik yang diliputi penyimpangan), dimulai dari Mu'awiyah bin Abi Shafyan, Yazid bin Mu'awiyah hingga seterusnya sampai runtuhnya Khilafah Islam, kecuali dua tahun masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Keempat, periode *al-mulkan 'jabariyan* (kepemimpinan politik yang berkuasa dan diktator), setelah hancurnya Khilafah Islam, sejak tahun 1924 sampai sekarang. Kemudian kelima, sejarah akan

¹ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 31

² Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar, "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah," *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83, <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.

berulang pada periode *al-khilafata 'ala minhaji an-nubuwwah*, yaitu sebuah kepemimpinan politik berdasarkan manhaj Nabi, tetapi bukan masa kenabian karena kenabian sudah berakhir Hussain bin Muhammad Ali Jabir, *Menuju Jama'atul Muslimin - Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*, ed. oleh Abu Rodli & M. Fatchullah, I (Jakarta: Robbani Press, 1990)..

Pengungkapan politik Islam sebagai gerakan dengan memaparkan perjalanan khilafah dari masa kenabian hingga masa *al-mulka jabariyan*, termasuk sejarah politik Islam di Indonesia dan proyeksi periode kepemimpinan *al-khilafata 'ala minhaji an-nubuwwah*, pertama, menunjukkan sebuah bukti kongkrit bahwa politik dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Sehingga dengan politik banyak ajaran Islam yang bisa dilaksanakan secara maksimal, misalnya, untuk mewujudkan Islam sebagai Rohmatan Lil 'Alamien.

Kedua, sebagai implementasi bahwa umat Islam diciptakan oleh Allah sebagai ummat yang terbaik (Q.S. 3:110), tidak hanya sekedar konsep dan wacana, tetapi telah mewujudkan dalam kehidupan realitas, dimana bukti-buktinya hingga sekarang masih terpelihara secara baik dan bisa diteliti, dikaji dan dipelajari oleh berbagai kalangan akademisi, baik sisi pemerintahan, pendidikan dan sebagainya. Karena ajaran itulah yang mendorong ummat Islam untuk menjadi ummat yang terbaik di masanya (*khoiru ummah*).³

Ketiga, diharapkan bisa mendorong kalangan ulama dan pemikir Islam untuk bisa mengambil pelajaran dan khazanah, sehingga disamping mampu membedah atau mengurai perjalanan politik Islam secara ilmiah, juga mampu menjawab berbagai problem politik umat Islam hari ini dan di masa yang akan datang. Padahal banyak hal yang bisa digali untuk merumuskan format yang tepat untuk negara atau wilayah tertentu dengan pola pemerintahan yang pernah dipakai oleh negara atau wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan Izzul Islam wal Muslimun.

Selain beberapa nama itu, tokoh pergerakan Islam yang tidak kalah penting adalah Hasan al-Banna. Beliau berasal dari tanah Mesir dan mempunyai pemikiran yang menarik dalam bidang politik. Ada dua hal yang bersifat kontradiktif dalam konteks hubungan politik antara Islam dan negara di negara-negara Muslim atau negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia. Kedua hal tersebut yakni; Pertama, posisi Islam yang menonjol karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk negara setempat. Kedua, sekalipun dominan Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik negara bersangkutan. Sebagai agama yang dominan dalam masyarakat Indonesia, Islam telah menjadi unsur yang paling berpengaruh dalam budaya Indonesia dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam politik Indonesia. Namun demikian Islam hanya berperan marjinal dalam wilayah kehidupan politik nasional. Hal ini antara lain disebabkan karena dikotomi "politik Islam" dan "non politik Islam" di kalangan umat Islam Indonesia yang telah berlangsung lama. Hasan al-Banna merupakan tokoh

³ Mohammad Latief dkk., "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

pembaharuan pemikiran Islam yang juga pendiri sekaligus Mursyid „Aam pertama Ikhwanul Muslimin⁴.

Bagi Hasan al-Banna pembaharuan itu boleh dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Pemikiran pembaharuan Hasan Al-Banna berdasarkan atas keyakinan bahwa Islam adalah agama universal yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, yang pada intinya dapat dikemukakan dalam lima aspek, yaitu: agama/moral, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di Indonesia, Ikhwanul Muslimin semakin berkembang setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang ajarannya identik dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi yang kemudian keberadaannya dilarang oleh Soekarno. Kemudian ketika Partai Masjumi dilarang pada tahun 1960 oleh Rezim Otoriter, tokoh-tokoh Masjumi termasuk M. Natsir kemudian mengalihkan perhatiannya ke aktivitas dakwah dan pendidikan, dan lalu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Ikhwanul Muslimin, selanjutnya disingkat IM adalah sebuah organisasi pergerakan Islam kontemporer yang besar. Organisasi ini tersebar di kurang lebih 70 negara, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di wilayah lainnya. Organisasi ini didirikan oleh Hasan Al-Banna (1324-1368 H/ 1906-1949 M) di Mesir, pada bulan April 1928. Organisasi ini menyeru untuk kembali kepada Islam, sebagaimana terdapat dalam Alqur'an dan Sunnah,⁵ yang mengajak untuk menerapkan syari'at Islam dalam realitas kehidupan, mengembalikan kejayaan Islam dan berdiri menentang arus sekularisasi di kawasan Arab dan dunia Islam. Menurut Anggaran Dasar (AD) IM disebutkan, bahwa tujuan gerakan organisasi ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Tujuan lain IM adalah membebaskan seluruh negeri Arab dan Islam dari kekuasaan asing, mendorong Liga Arab dan Pan Islamisme, ⁶membentuk negara yang melaksanakan semua hukum dan ajaran Islam seutuhnya dan mendukung kerjasama internasional untuk melindungi hak dan kebebasan serta berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian dan mengembangkan peradaban kemanusiaan yang baru.⁷

Dalam sebuah buku yang bertajuk *Transnational Islam in South and Southeast*, Norhaidi Hasan membagi manifestasi Islam transnasional dalam empat kategori; pertama yang berorientasi sufisme, mereka adalah kelompok yang mencoba mengikuti Rasulullah secara utuh, misalnya saja Jamaah Tabligh. Kedua, adalah gerakan kesalehan; Ketiga, adalah gerakan politik; dan keempat, adalah gerakan charity. Norhaidi Hasan menambahkan bahwasanya empat kategori tersebut merupakan tipe gerakan Islam transnasional yang non-radikal.⁹ Setelah Rasulullah SAW wafat, paradigma politik Islam terus berkembang. Dien Syamsuddin,

⁴ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 12

⁵ Amir Reza Kusuma, "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

⁶ "PEMIKIRAN_POLITIK_SAYYID_QUTB_TENTANG_PEMERINTAHAN (1).pdf," t.t.

⁷ Zaki Ulya, "Perbandingan Pemilihan Kepala Negara Di Indonesia (Suatu Kajian Hukum Positif Indonesia Dan Fiqh Siyasa)", *Jurnal Al Qadha*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2015, hlm. 27

mengkatagorisasikannya pada tiga paradigma: (1) Agama dan negara tidak bisa dipisahkan (integrated); (2) Agama dan negara berhubungan secara simbiotik; dan (3) Islam tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan (sekularistik). Nuansa politik dalam Islam telah berkembang sejak zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, menurut keyakinan mayoritas Muslim menerapkan model masyarakat Islam ideal era Nabi SAW bukanlah utopia, sebab model itu pernah terbukti dalam sejarah. Dakwah ini tampil membangun dunia berdasarkan kehormatan dan kebersihan,⁸ hal-hal yang positif dan membangun, kebebasan dan pembaharuan, berangkat dari pengetahuan dan keyakinan, kepercayaan dan iman, keadilan dan kehormatan serta kinerja yang berkesinambungan, untuk membangkitkan dan meningkatkan kehidupan serta memberikan hak kepada siapapun yang berhak. Dengan tahap-tahap perkembangan ini, jazirah Arab bisa menyaksikan kebangkitan yang penuh barokah, yang tidak pernah disaksikan perkembangan macam apapun dan tidak pernah dijumpai yang seperti itu dalam perjalanan sejarah manusia

Secara garis besar ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pertama, tahap pembinaan kader dan konsolidasi internal, yaitu dalam tiga tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi.⁹ Tahap kedua, secara terang-terangan dengan menyeru kepada kerabat-kerabat dekat, membuat kesepakatan dengan kaum Qurays, hijrah ke Habasyah yang pertama, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khatthab masuk Islam dan berbagai konsekuensi dari perlawanan kaum Qurays. Tahap ketiga, dakwah di luar Makkah melalui kabilah-kabilah, di Yatsrib, Bai'at, hijrah ke Madinah, melakukan perjanjian dengan pihak Yahudi, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq, perang Bani Quraizhah dan sebagainya.¹⁰

1. Biografi Hasan Al- Banna

Hasan Al-Banna dilahirkan pada tahun 1906 M, di sebuah desa bernama Al-Mahmudiyyah, yang masuk wilayah Al-Buhairah. Ayahnya seorang yang cukup terkenal dan memiliki sejumlah peninggalan ilmiah seperti *Al-Fathurrabbani Fi Tartib Musnad Al-Imam Ahmad Asy-Syaibani*, ia adalah Ahmad bin Abdurrahman Al-Banna yang lebih dikenal dengan *As-Sa'ati*. Al-Banna memulai pendidikannya di *Madrasah Ar-Rasyad Ad- Diniyyah* dengan menghafal Alqur'an dan sebagian hadis-hadis Nabi serta dasar-dasar ilmu bahasa Arab, di bawah bimbingan *Asy-Syaikh Zahran* seorang pengikut tarekat *Shufi Al-Hashafiyyah*.¹¹

Al-Banna sangat terkesan dengan sifat gurunya yang mendidik, sehingga ketika *Asy-Syaikh Zahran* menyerahkan kepemimpinan madrasah itu kepada orang lain, Hasan Al-Banna pun ikut meninggalkan madrasah. Selanjutnya ia masuk ke *Madrasah I'dadiyyah* di Mahmudiyyah, setelah berjanji kepada ayahnya untuk menyelesaikan hafalan Alqur'annya di rumah. Tahun ketiga di madrasah inilah awal

⁸ Mohamad Latif dkk., "Merajut Persatuan Indonesia Dalam Momentum Mosi Integral Mohammad Natsir," *Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).

⁹ Amir Reza Kusuma, "TAUHID SEBAGAI LANDASAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT" 9, no. 1 (2023), <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.53429/spiritualis.v9i1.453%20ofor%20articles>.

¹⁰ Miriam Budi Raharjo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta: Gramedia utama, 2009).

¹¹ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 4

perkenalannya dengan gerakan-gerakan dakwah melalui sebuah organisasi yang *Jum'iyatul Akhlaq Al-Adabiyyah*, yang dibentuk oleh guru matematika di madrasah tersebut, bahkan Al-Banna sendiri terpilih sebagai ketuanya. Aktivitasnya terus berlanjut hingga ia bergabung dengan organisasi *Man'ul Muharramat*. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di *Madrasah Al-Mu'allimin Al-Ula* di kota Damanhur. Di sinilah ia berkenalan dengan tarekat *Shufi Al-Hashafiyah*. Ia terkagum-kagum dengan majelis dzikir dan lantunan nasyid yang didendangkan secara bersamaan oleh pengikut tarekat tersebut.

Lebih tercengang lagi ketika ia dapati bahwa di antara pengikut tarekat tersebut ada guru lamanya yang ia kagumi, *Asy-Syaikh Zahran*. Akhirnya Al-Banna bergabung dengan tarekat tersebut. Sehingga ia pun aktif dan rutin mengamalkan dzikir-dzikir *Ar-Ruzuqiyyah* pagi dan petang hari. Tidak ketinggalan, perayaan maulud Nabi pun rutin ia ikuti. Di antara aktivitas selama bergabung dengan tarekat ini ialah pergi bersama teman-teman se-tarikat ke kuburan, untuk mengingatkan mereka tentang kematian dan *hisab* (perhitungan amal). Mereka duduk di depan kuburan yang masih terbuka, bahkan salah seorang dari mereka terkadang masuk ke liang kubur tersebut dan berbaring di dalamnya agar lebih menghayati hakekat kematian nanti. Al-Banna terus bergabung dengan tarekat tersebut sampai pada akhirnya ia berbai'at kepada *syaikh* tarekat saat itu yaitu *Asy-Syaikh Basyuni Abd Al-Jabir Rizq*. Sepeninggal Basyuni, Al-Banna berbai'at kepada *asy-Syaikh Abdul Wahhab Al-Hashafi*, pengganti pendiri tarekat tersebut. Ia diberi ijazah wirid-wirid tarekat tersebut. Al-Banna pernah mengungkapkan: „Dan saya berteman dengan saudara-saudara dari tarekat *Al-Hashafiyah* di Damanhur. Saya rutin mengikuti acara *al-hadhrat* di Masjid Taubah setiap malam. Sayyid Abdul Wahhab-pun datang, dialah yang memberikan ijazah di kelompok tarekat *Hashafiyah Syadziliyyah*, dan saya mendapat ajaran tarekat ini darinya. Ia juga memberi saya wirid dan amalan tarekat itu“.

Karena faktor tertentu, akhirnya kelompok tarekat ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama *Jum'iyah Al-Hashafiyah Al-Khairiyah* dan diketuai oleh teman lamanya, Ahmad As-Sukkari. Sementara itu, Hasan Al-Banna menjadi sekretarisnya dan ia mengatakan: „Di saat-saat ini, nampak pada kami untuk mendirikan organisasi perbaikan yaitu *Al-Jum'iyah Al-Hashafiyah Al-Khairiyah*, dan aku terpilih sebagai sekretarisnya...¹² Lalu dalam perjuangan ini, aku menggantikannya dengan organisasi *Ikhwanul Muslimin*“. Setelah itu Al-Banna menghabiskan waktunya di *madrasah Al-Mu'allimin* dari tahun 1920-1923 M. Di sela-sela masa itu, ia juga banyak membaca majalah *Al-Manar* yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridha, salah seorang tokoh gerakan *Ishlahiyyah* yang banyak dipengaruhi pemikiran Mu'ta-zilah. Di sisi lain, ia pun suka mendatangi *Asy-Syaikh Muhibbuddin Al-Khathib* di perpustakaan salafinya. Al-Banna, ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke *Darul Ulum*, sempat bimbang antara melanjutkan atau menekuni dakwah dan amal. Ini dikarenakan interaksinya dengan buku *Ihya' Ulumuddin*. Namun bermodalkan nasehat dari salah seorang gurunya, ia mantap

¹² Amir Reza Kusuma, "Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Hidup Islam" 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.21111/jios.vii2>.

untuk melanjutkan pendidikan. Ia akhirnya memutuskan melanjutkan pendidikannya di *Darul Ulum*. Di sini, ia sangat giat membentuk *jamaah-jamaah* dakwah, sehingga di tengah-tengah aktivitasnya tercetus dalam benaknya, ide untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang duduk di warung kopi dan berada di desa-desa terpencil untuk mendakwahi mereka.¹³ Pada akhirnya Al-Banna lulus dari *Darul Ulum* pada tahun 1927M. Usai pendidikannya di *Darul Ulum*, ia diangkat menjadi guru di daerah Al-Isma'iliyyah. Ia pun mengajar di sekolah dasar selama 19 tahun. Sebelumnya, ia datang ke daerah itu pada tanggal 19 September 1927 dan tinggal di sana selama 40 hari untuk mempelajari seluk-beluk lingkungan tersebut. Ternyata, ia dapati banyak terjadi perselisihan di antara masyarakat, sementara ia berkehendak agar dapat berkomunikasi, bergaul dengan semua pihak, dan mempersatukannya.¹⁴

b. Latar Belakang Pemikiran Hasan Al-Banna

Berikut beberapa kejadian serta peristiwa yang mempengaruhi pemikiran politik Hasan Al-Banna

a) Keikutsertaan Hasan Al-Banna dalam Tarekat Al-Hasafiyah, membuat beliau menanamkan pengaruh dalam dirinya, betapa eratnya hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya. Berkat hubungannya dengan sufi dia senantiasa menghargai tasawuf, selama hal tersebut tidak mengandung bid'ah yang menurut muslim skripturalis sering mengotori praktik keyakinan sufi. Hasan Al-Banna tidak mengutuk tasawuf, tetapi justru menyerukan perubahan sufi yang salah jalan dan membersihkan sufi dari noda. Jadi bisa disimpulkan bahwa, beliau meneguk salafisme yang dikemas dengan gaya yang tidak kuno, sehingga bisa disebut beliau sebagai seorang neo-sufi.¹⁵

b) Kepergian Hasan Al-Banna pada 1923 ke Kairo untuk belajar. Pada masa itu beliau banyak terlibat dengan perkembangan pemikiran atau situasi politik yang sedang melanda Mesir. Ketika itu Mesir sedang mengalami ketidakmenentuan politik. Ditandai dengan selalu terjadinya pertikaian antara kelompok-kelompok politik yang ada serta westernisasi yang melekat kuat.

c) Saat Hasan Al-Banna menginjak remaja, dunia Islam sedang mengalami penurunan kepemimpinan Khilafah. Ditandai dengan runtuhnya Khilafah Turki Usmani dan diplokamirkannya Republik Turki yang modern sekuler oleh Mustafa Kemal Atarturk pada tanggal 02 Maret 1924. Dari hal inilah masyarakat muslim mulai mengganti hukum Allah dan menggantinya dengan Hukum *Wadh'iy* (buatan manusia). Dan Hasan Al-Banna menolak dengan hal ini dan mengatakan :

16

¹³ "Latief et al. - Problems of the Secular State and Its Impact on Ju.pdf," t.t.

¹⁴ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 8

¹⁵ Muhammad Iqbal, dkk, *Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 18

¹⁶ Nirhamna Hanif Fadillah, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25-62, <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.8456>.

“ pada dekade ini yang saya lalui di Kairo kala itu, semakin merajalela arus kerusakan, kebejatan berpendapat, dan berpikir dianggap sebagai kebenaran rasio. Kerusakan moral dan akhlak di anggap sebagai kebebasan individu. Gelombang kemurtadan dan gaya hidup bebas melanda sangat deras tanpa ada penghalangannya, didukung oleh berbagai kasus dan situasi yang mengarah kesana.

Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk, yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636, 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyah (th 636), di dekat sungai Efrat. Pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal, Rustam Farrukhzad, Orang Kristen Mesir yang beragama Koptik diperlakukan baik oleh tentara Islam yang menang perang Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, VIII (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

c. Pemikiran Politik Al-Banna

Hassan al-Banna disebut-sebut sebagai *neo-salafie* dengan pemikiran tiga pandangan dasar yaitu 1) Islam adalah sebuah sistem komprehensif yang mampu berkembang sendiri, 2) Islam memancar dari dua sumber fundamental yaitu al-Quran dan al-Hadis dan 3) Islam berlaku untuk segala waktu dan tempat. Al-Banna membagi fase pembinaan dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu 1) fase pengenalan seluruh lapisan masyarakat, 2) fase pembentukan kader (*marhalah al-takwin*) dari elemen pilihan yang sudah terkumpul, dibentuk regu-regu pejuang dakwa, 3) fase realisasi (*marhalah al-tanfidz*) dengan melakukan gerakan (*harakah*) dakwa bersama-sama mewujudkan hukum Allah SWT di muka bumi.¹⁷

Pemikiran Hassan al-Banna yang berkaitan dengan politik terbagi dalam 3 (tiga) kelompok pikiran, 1) reformasi sosial dengan asas akidah, 2) tidak adanya pemisahan agamadan negara 3) syariat Islam sebagai undang-undang tertinggi dalam pemerintahan Islam. Ikhwanul Muslimin (IM) memproklamirkan diri sebagai gerakan politik pada tahun 1939, yaitu pada Mukhtamar ke-5 IM, bertepatan dengan peringatan 10 tahun kelahirannya. Ada dua alasan pokok yang berkaitan politik yang merupakan tujuan umumnya, yaitu; pertama membebaskan negara Islam dari penguasa asing. Kedua, mendirikan negara Islam yang bebas melaksanakan hukum Islam, menerapkan sistem sosial masyarakat dan menyampaikan prinsip dan dakwahnya kepada seluruh manusia. Meskipun begitu, memang terdapat perbedaan antara PKS dengan Hasan al-Banna. Hasan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin bersifat lebih keras terhadap pemerintahan yang berkuasa, hal ini menyebabkan Ikhwanul Muslimin kerap bersinggungan dan mengalami konflik dengan pemerintah. Sementara PKS lebih menesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan tidak memaksakan dijadikannya Syari'at Islam dengan segera atau berdirinya Negara

¹⁷ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 14

Islam. Sebab bagi PKS, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mengislamkan masyarakat terlebih dahulu.¹⁸

Kebijakan lain, antara lain, dalam beberapa departemen telah mengupayakan agar dikepalai para pegawai yang efisien dan jujur. Ia memisahkan jabatan peradilan dan eksekutif. Pengadilan bersifat independen, bahkan dari pengawasan Gubernur. Dalam surat pengangkatan seorang Gubernur dijelaskan secara rinci dan jelas kewajiban dan haknya serta dibaca dihadapan khalayak ramai. Juga menekan tugas seorang Gubernur, yaitu bukan penguasa, tetapi pelayan dan keteladanan. Juga mengurangi, bahkan menghilangkan pembatas antara penguasa dan rakyat, dipermudah menemui pimpinan, senantiasa membuat pertanggung jawaban, yaitu setiap musim haji semua pegawai tinggi melapor kepada khalifah; juga membentuk Tim Pengaduan atau Penyelidik Keliling sebagai yang diamanahkan kepada Muhammad bin Muslimah Ansari, seorang yang dikenal mempunyai integritas tinggi. Salah satu yang kena teguran dan bahkan dipecat adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Gubernur Kufa; juga Ayaz bin Ghanam, Gubernur Mesir¹⁹

Politik dalam konteks sebuah negara adalah untuk memberikan perlindungan serta keadilan kepada semua warga negara yang ada di dalam sebuah wilayah. Kehidupan manusia yang nyaman dan tentram tidak akan dapat tercapai tanpa adanya penataan politik yang baik. Sesungguhnya ada perbedaan antara kepartaian dan politik, keduanya mungkin bias bersatu ataupun berpisah dalam partai pastia adanya politik, namun berpolitik juga tidak harus melalui partai. Dengan adanya pandangan bahwa manusia itu harus hidup berdampingan, maka akan munculah saling membutuhkan antar sesama. Dari sikap saling membutuhkan itu, hendaklah siapa yang membedakan antara manusia dalam sebuah negara itu dihilangkan. Tetapi maksud menghilangkan perbedaan ini hanya sebatas urusan dunia semata. Pendapat al-Mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Di sinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, lanjut al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak

1. Agama dan Politik

Politik adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siyasah, yaitu ilmu tata negara. Pengertian dan konsep politik atau siyasah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia merupakan sistem peradaban yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.¹⁹ Sejak IM didirikan oleh Al-Banna kondisi Mesir dan dunia Arab berada dalam lingkungan pemikiran Barat. Para tokoh sekuler hanya membatasi aktivitas

¹⁸ Mohammad Muslih dkk., "Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri" 6, no. 2 (2021): 16, <https://doi.org/DOI :10.15575/jaqfi.v6i2.14028>.

¹⁹ Mohammad Latief, Khoirudiin Abdullah, dan Amir Reza Kusuma, "SEKULARISASI PENDIDIKAN INDONESIA DALAM ORIENTASI MATERI AJAR" 1 (2021): 11.

agama sebatas dinding masjid dan menjadi urusan pribadi Padahal pada dasarnya Islam adalah sistem yang sempurna.²⁰

Kesuksesan dakwah Rasulullah pun merupakan suatu implementasi dari strategi politik yang beliau rancang, bisa kita lihat mulai dari hijrah ke Madinah hingga puncaknya adalah *Fathu Makkah* (penguasaan Mekah). Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah dan para sahabat bukannya mencoba lari dari intimidasi rezim kafir Quraisy, namun justru sebaliknya Rasulullah dan para sahabat melakukan konsolidasi politik yakni mulai dari membangun kekuatan politik internal hingga mengadakan koalisi politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani melalui nota perjanjian Piagam Madinah. Beliau berpendapat bahwa, Politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat.

Adapun yang dimaksud dengan politik sisi internal adalah mengatur roda pemerintahan, menjalankan tugas-tugasnya, merinci hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, melakukan pengawasan terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik serta diluruskan jika kemudian mereka menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah 'menjaga kebebasan dan kemerdekaan bangsa, menanamkan rasa kepercayaan diri, kewibawaan, dan meniti jalan menuju sasaran - sasaran yang mulia, yang dengan cara itu bangsa akan memelihara harga diri dan kedudukan tinggi dikalangan bangsa-bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya dengan menetapkan pola interaksi bilateral maupun multilateral yang menjamin hak-haknya serta mengarahkan semua negara menuju perdamaian internasional yang peraturan ini bisa mereka sebut Hukum Internasional.²¹

Oleh karena itu, Dalam pemikiran politik, Hasan al-Banna menghubungkan iman dengan aktivitas politik. Tentunya seorang Muslim tidak sempurna keislamannya kecuali jika dia menjadi politisi, yang memiliki pandangan kedepan dan memberikan perhatian penuh terhadap isu-isu dan ras. Menurutnya, yang Islami harus mengarah pada perhatian terhadap masalah bangsa. Islam adalah sistem yang komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan. Namun demikian Islam dan Politik Indonesia dari zaman kezaman terus berkembang dan meningkat, tentu tidak terlepas dari perkembangan Agama dan politik di Indonesia pada umumnya.

Ia memperkenalkan *reform* (penataan) yang luas di lapangan pertanian, misalnya, di wilayah penaklukan di mana tanah yang semula dikuasai oleh elit dibagi-bagikan kepada rakta, juga membentuk departemen kesejahteraan rakyat yang mengawasi pekerjaan pembangunan dan melanjutkan rencana-rencana pembangunan. Selama masa pemerintahannya pengadilan dijalankan oleh Qadi (hakim sipil) yang diangkat oleh Khalifah dan bebas dari kontrol Gubernur. Umar juga menaruh minat kepada masalah kemiliteran dengan mendirikan pusat-pusat kemiliteran di Madinah, Kufa, Basra, Mesir, Damaskus, Hems dan Palestina, juga yang sama penting adalah perlindungan pada kaum non-Muslim (*dzimmi*), termasuk

²⁰ Rakhmad Agung Hidayatullah dkk., "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973-86, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.

²¹ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm 36

penglibatan kelompok non-Muslim dalam penyelenggaraan negara Mengenai manhaj dan pentahapan, mengadopsi pendekatan tadarruj (gradual) yang diterjemahkan dalam pentahapan yang dirumuskan Ikhwanul Muslimin, yakni ta'rif (pengenalan), takwin (pembinaan), tanfidz (pelaksanaan), dan tamkin (pengokohan) Sedangkan sebagai sarana tarbiyah atau pendidikan

bagi para kadernya, melakukan adaptasi dari perangkat yang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin dengan memakai sarana usroh/halaqah, daurah (ceramah), taushiah (ceramah singkat), penugasan, seminar, bedah buku, mukhayyam (kemah), mabit (bermalam), rihlah (berwisata), baca buku, taklim rutin partai, tarhib (ibadah khusus) Ramadhan, dan kajian fiqh.³⁷ Namun, dari semua perangkat tarbiyah tersebut, hal yang merupakan inti dan paling berperan dalam pendidikan kader adalah adalah sistem Usrah yang kemudian diganti nama menjadi Halaqah. Perangkat tarbiyah ini menjadi utama karena di dalamnya juga berlangsung perekrutan atau pengakderan anggota baru. Sekalipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masing-masing pemimpin mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, bukan masalah prinsip, tetapi terkait dengan gaya kepemimpinan. Rasulullah SAW merupakan model pemimpin yang memadukan antara kearifan dan ketegasan. Abu Bakar merupakan model pemimpin yang arif, sekalipun tidak meninggalkan ketegasan. Umar bin Khatthab adalah pemimpin yang kuat, cerdas dan inovatif. Usman bin Affan adalah model pemimpin yang arif dan demawan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah model pemimpin yang cerdas dan tegas serta sederhana.²²

Berkaitan dengan target dan tujuan tarbiyah, mengadopsi penuh dari perumusan Ikhwanul Muslimin. Dalam modul Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula dikemukakan bahwa tarbiyah diharapkan menghasilkan para peserta yang memiliki kriteria tertentu terkait dengan aqidah yang lurus (salimul aqidah), ibadah yang benar (shalihul ibadah), akhlak yang baik (matinul khuluq), berkemampuan produktif (qadirun ala al-kasbi), berwawasan luas (mustaqqaful fikri), berbadan kuat (qawiyul jismi), mampu memerangi nafsu (mujahidun linafsihi), mampu mengatur diri (munaddlamun fi syu'unih), mampu mengatur waktu (haritsun ala waqthihi), dan bermanfaat bagi orang lain (nafi'un li ghairihi)

2. Konsep Khalifah Islamiyah Hassan al-Banna

Hassan al-Banna menilai bahwa khalifah merupakan rukun atas berlangsungnya pemerintahan Islam. Ia menandakan bahwa langkah-langkah menuju khalifah Islamiyah wajib dilaksanakan dengan menguatkan barisan keluarga. Sehingga kemampuan umat Islam benar-benar tangguh dalam membentuk khalifah Islamiyah. Imam tidak mutlak dari Ikhwanul Muslimin, siapapun bila

²² Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma, "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90-99.

memang mampu dapat menjadi Imam, dan ikhwanul muslimin sebagai garda depan melindungi. Dalam kaitan ini. Al-Banna mengajak untuk menghindari jauh-jauh dari partai-partai politik dan lembaga lembaga politik lainnya yang mengakibatkan perpecahan. Ia sangat menolak multi partai dalam sebuah pemerintahan.²³

Dalam salah satu bukunya Risalah al-Jihad yang dikutip Muhammad Ali Gharizhah, Hassan al-Banna menulis "Islam adalah ibadah dan kepemimpinan, agama, dan negara, rohani dan jasmani, shalat dan jihad, ketaatan dan pemerintahan, mushaf dan pedang tidak dapat dipisahkan antara satu dari yang lain. Dari kata-kata ini Hassan al-Banna menjadikan jihad adalah rukun yang asasi bagi gerakan Ikhwanul Muslimin yang pada akhirnya gerakan adalah satu bentuk kerja dan perjuangan bukan sekedar filsafat ataupun pemikiran. Jihad adalah kewajiban agama yang sama sekali tidak lebih kecil artinya dibanding kewajiban-kewajiban lain, bahkan ia adalah metoda dasar dalam dakwah demi mencapai tujuan yang meliputi seluruh sisi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial."²⁴

Sikap pemikiran Hasan Al-Banna terhadap pemerintahan, berkaitan erat dengan pemahaman akan esensi Islam dan aqidahnya. Islam sebagaimana yang dipersepsikan Hasan al-Banna menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilarnya. Hasan memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan Al-Banna ketika membicarakan tentang problematika hukum di Mesir dan bagaimana memecahkannya berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia

Berpendapat bahwa pilar-pilar itu Tanggung jawab pemerintah, dalam arti bahwa ia bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan, tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara kepentingan bersama. Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki system yang satu, yaitu Islam. Dalam arti, ia harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan nasihat. Menghormati aspirasi rakyat. Artinya, di antara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.²⁵

Sehubungan dengan itu, peneliti melihat perlunya umat mengenal secara mendalam pemikiran Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna pernah memaparkan konsepsi politik ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dengan politik dan sikap seorang muslim terhadapnya. Beliau berpendapat bahwa: "politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan persoalan internal maupun eksternal umat. Ia memiliki dua sisi: internal dan eksternal. Maksud dengan sisi internal politik adalah "mengurus persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik

²³ Hasan Al-Banna, *Panggilan al-Qur'an*, (Terj), Pustaka, 1998, hlm. 154

²⁴ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, hlm. 35

²⁵ Hasan Al-Banna, *Panggilan al-Qur'an*, (Terj), Pustaka, 1998, hlm 22

adalah “memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengahnya bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya”²⁶

3. Persamaan Hak Penuh menurut Hasan Al Bana

Karya karyanya berjudul *Al-Islam Yahmiil Aqalliyyaati wa Yashuunu Huqunqal Ajaanib* (Islam menjagakelompok minoritas dan memelihara hak-hak orang lain). Dalam bukunya itu dinyatakan Islam menyucikan persatuan manusia secara universal. Kemudian mensucikan persatuan agama secara universal pula ketika terjadi fanatisme. Islam mengharuskan para pemeluknya untuk mengimani seluruh agama samawi. Kemudian Hassan al-Banna menegaskan, inilah yang Islam yang dibangun di atas sikap moderat dan kesadaran tinggi, tidak mungkin diikuti oleh pemecah belahpersatuan yang terpadu ini. Namun sebaliknya, kesucian agama yang mampu mempersatukan manusia ini terkadang dijadikan alat legitimasi kepentingan tertentu. Kemudian Dalam tulisannya yang bertajuk *Musykilaatunaa fi Dhau'in-Nizhaam I-Islami* (problematika kita dalam perspektif sistem Islam), Hassan al-Banna menyatakan dengan jelas “minoritas nonmuslim yang menjadi warga negara ini diajari kesempurnaan ilmu tentang bagaimana mencapai ketenanganhidup, keamanan, keadilan, dan persamaan hak secara penuh dalam menjalankan seluruh ajaran agamanya. Dengan nada menyatukan, Hassan al-Banna menambahkan, sejarah panjang yang membenteng hubungan baik dan mulia antara warga negara muslim dan nonmuslim, cukuplah bagi kita sebagai bekal. Kita perlu mencatat prestasi para warga negara yang mulai itu karena mereka menjunjung tinggi makna-makna ini pada setiap kesempatan, menjadikan Islam sebagai makna nasionalismenya, meskipun hukum-hukum dan ajaran ajarannya tidak berasal dari akidah mereka (akidah non Islam).”²⁷

Arus informasi dan globalisasi tak ayal menjadikan pemikiran Hasan al-Banna yang berasal dari Timur Tengah sebagai central ajaran Islam dapat masuk di Indonesia sebagai receiver dalam ajaran dan pemikiran Islam. Masuk dan berkembangnya pemikiran tersebut dipengaruhi oleh faktor luar negeri, yaitu kenaikan harga minyak dunia, hubungan erat Liga Dunia Islam dengan DDII, hubungan bilateral Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia dalam pendidikan, serta hubungan kelompok revivalis Malaysia dengan Indonesia. Dari dalam negeri berkembangnya pemikiran Hasan al-Banna dipengaruhi oleh sikap represif pemerintah orde baru dan dakwah dan pengkaderan yang dilakukan oleh DDII.²⁸

4. Islam di Indonesia

Untuk mempelajari suatu agama, termasuk agama Islam harus bermula dari mempelajari aspek geografis dan geografi persebaran agama-agama dunia. Setelah itu

²⁶ Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022), [https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542).

²⁷ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, hlm 75

²⁸ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*, hlm. 80

dapat dipahami pula proses kelahiran Islam sebagai salah satu dari agama dunia, terutama yang dilahirkan di Timur Tah, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiganya dikenal sebagai agama langit atau wahyu. Kedua hal itu, geografi persebaran dan persebaran agama itu sendiri. Selanjutnya untuk dapat memahami proses perkembangan Islam sehingga menjadi salah satu agama yang dianut oleh penduduk dunia yang cukup luas, harus dikenali lebih dahulu tokoh penerimaan ajaran yang sekaligus menyebarkan ajaran itu, yaitu Muhammad saw., sang pembawa risalah. Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia ini memaksa Islam sebagai pendatang, untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan dimasukinya dalam pengakuan dunia Islam. Langkah ini merupakan salah satu watak Islam yang pluralistis yang dimiliki semenjak awal kelahirannya.²⁹

Kedatangan Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Para Tokoh yang mengemukakan pendapat itu diantaranya ada yang langsung mengetahui tentang masuk dan tersebarnya budaya serta ajaran agama Islam di Indonesia, ada pula yang melalui berbagai bentuk penelitian seperti yang dilakukan oleh orang-orang barat (eropa) yang datang ke Indonesia karena tugas atau dipekerjakan oleh pemerintahnya di Indonesia. Tokoh-tokoh itu diantaranya, Marcopolo, Muhammad Ghor, Ibnu Bathuthah, Dego Lopez de Sequeira, Sir Richard Wainsted.³⁰

Mengenai menghargai aspirasi rakyat, Al-Banna menjelaskan, 'Di antara hak umat Islam adalah mengawasi roda pemerintahan sedetail mungkin dan aktif bermusyawarah berkenaan sesuatu yang dipandang baik. Sementara itu, kewajiban pemerintah adalah bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil masukan-masukan yang baik. Allah SWT telah memerintahkan kepada pemerintah agar melakukan hal itu, 'Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.' (Ali Imran: 159). Bahkan, Allah memuji kaum muslimin yang mau bermusyawarah sebagai muslimin yang baik, 'sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka' (Asy-Syura: 38).

Masalah ini juga ditegaskan oleh Sunah Rasulullah SAW dan Khulafur Rasyidin. Ketika muncul suatu masalah, mereka mengumpulkan para ahli dari kaum muslimin, bermusyawarah, dan mengambil pendapat yang benar dari mereka. Lebih dari itu, para khalifah mengajak dan menganjurkan kaum muslimin untuk (berpegang) pada pendapat yang benar. Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, 'Jika kalian melihat aku di atas kebenaran, maka dukunglah (untuk melaksanakannya), dan jika kalian melihatku dalam kebatilan, maka betulkan dan luruskanlah. Umar bin Khatthab berkata, "Siapa saja yang melihatku menyimpang, maka luruskanlah".

²⁹ Uka Tjandrasmita (Ed.), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 73

³⁰ Ibid p. 83

Masyarakat Muslim Perspektif Hasan Al-Banna

Hasan Al-Banna merujuk kepada pendapat Sayid Qutub tentang karakteristik Masyarakat muslim, ia berpendapat bahwa karakteristik masyarakat muslim adalah : Ia berdiri di atas landasan aqidah, yang terefleksikan pada peribadahan kepada Allah swt. Semata dalam keyakinan, simbol-simbol keislaman, dan ibadah individunya, juga dalam peraturan dan undang-undangnya. Ideologi adalah fondasi, yang oleh Islam diletakkan sebagai dasar dari pilar-pilar lainnya seperti kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau lainnya. Karakter ini merupakan hal yang membedakan antara masyarakat muslim dengan masyarakat lainnya³¹. Hasan Al-Banna menjelaskan tentang asas-asas yang di atasnya tertegak masyarakat muslim, yang dianggapnya sebagai dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap, yaitu:

1. Memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran
2. Memperhatikan keluarga dan mendudukan status perempuan secara proporsional.
3. Menekankan kesetiakawanan, solidaritas sosial dengan berbagai jenisnya, juga persatuan.
4. Tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam.
5. Pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu.

Hasan Al-Banna menggambarkan kekhasan masyarakat Muslim, secara otomatis, proses pembentukannya juga bersifat khas. Yaitu dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima aqidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah kepada selain Allah, baik dalam keyakinan, ibadah, Syi'ar, aturan, maupun undang-undang. Kelompok ini melaksanakan dengan nyata dalam perjalanan hidupnya secara keseluruhan, berdasarkan asas ini. Ketika itu, terjadilah kelahiran atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsur dari hal itu adalah, pertama, sekelompok manusia. Kedua, terdidik di atas aqidah. Ketiga, kehidupannya diatur dengan landasan aqidah, seutuhnya.³²

Dari pendapat Hasan al banna di atas bawasanya umat muslim selain memiliki sifat sosial, namun harus memiliki solidaritas dalam kehidupan sehari-hari, meskipun dalam kehidupan sehari-hari banyak kita berbenturan dengan pemahaman atau keyakinan seperti kita di masyarakat, akan tetapi pada haekatnya umat muslim harus memahami dari berbagai karakteristik yang ada di masyarakat .

PENUTUP

Dengan demikian jika dilihat dari paparan di atas terkait dengan pemikiran Hasan Al-banna antara Politik dan Islam (Agama) penulis menarik kesimpulan bahwasany ajelas ruang lingkup dari Islam itu sendiri tidak memungkinkan untuk tidak menyentuh lingkup politik dan negara. Hal ini juga terkait dengan aturan dalam

³¹ Fadillah, Kusuma, dan Rajab al-Lakhm, "The Concept of Science in Islamic Tradition."

³² Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik Ikhwan untuk para Anggota khususnya dan seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1945*, (Solo :Era Intermedia, 2000), hlm. 63

Islam itu sendiri yang mengatur urusan-urusan yang memerlukan kekuasaan sebagai pelaksanaannya. Jadi agama dan politik mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan. Namun jika ditelaah dari pemikiran Hasan Al-banna ini tentu salah satu sebagai bahan acuan untuk masyarakat Indonesia, meskipun kita adalah negara demokrasi, dan juga bukan Negara Agama, namun alangkah ilmiyahnya hubungan antara negara dan agama tidak bisa dipisahkan, serta saling membutuhkan di antara kedua ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Banna, H. (2005). *Risala Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Banna, H. A. (1998). *Panggilam Al-Quran*. Jakarta: Pustaka.
- Iqbal, M. (2010). *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Muiz, U. a. (2000). *Pendidikan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Syamsudin, M. D. (2001). *Islam dan Politik Era Orde BARU*. Jakarta: PT : Logos Wacana Ilmu.
- Tjandrasasmita, U. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*. VIII. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ali Jabir, Hussain bin Muhammad. *Menuju Jama'atul Muslimin - Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*. Disunting oleh Abu Rodli & M. Fatchullah. I. Jakarta: Robbani Press, 1990.
- Budi Raharjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia utama, 2009.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Rofiqul Anwar Anwar. "Comparative Study of Ijtihad Methods Between Ahlussunnah and Syiah." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 6, no. 1 (9 Februari 2022): 83. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v6i1.6837>.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, Amir Reza Kusuma, dan Najib Rahman Rajab al-Lakhm. "The Concept of Science in Islamic Tradition: Analytical Studies of Syed Naquib Al-Attas on Knowledge." *Tasfiah: Jurnal Pemikiran Islam* 7, no. 1 (27 Februari 2023): 25–62. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v7i1.8456>.
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "Membangun Islamic Human Resource Development (I-HRD) di Perguruan Tinggi Berlandaskan Worldview Ekonomi Islam" 9, no. 1 (2023): 973–86. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8492>.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina dan Aristoteles." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Hidup Islam" 1, no. 2 (2023). [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.21111/jios.v1i2](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21111/jios.v1i2).

- . “TAUHID SEBAGAI LANDASAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT” 9, no. 1 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.53429/spiritualis.v9i1.453%20for%20articles>.
- “Latief et al. - Problems of the Secular State and Its Impact on Ju.pdf,” t.t.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. “PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ” 7 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25217/jf.v7i2.2542>.
- Latief, Mohammad, Khoirudiin Abdullah, dan Amir Reza Kusuma. “SEKULARISASI PENDIDIKAN INDONESIA DALAM ORIENTASI MATERI AJAR” 1 (2021): 11.
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhil. “Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy” 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Latif, Mohamad, Muhamad Fajar Pramono, Muqit Nur Rohman, dan Amir Reza. “Merajut Persatuan Indonesia Dalam Momentum Mosi Integral Mohammad Natsir.” *Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).
- Muslih, Mohammad, Ryan Arief Rahman, Amir Reza Kusuma, Abdul Rohman, dan Adib Fattah Suntoro. “Mengurai Disrupsi Paham Keislaman Indonesia Dalam Perspektif Tipologi Epistemologi Abid Al- Jabiri” 6, no. 2 (2021): 16. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v6i2.14028>.
- “PEMIKIRAN_POLITIK_SAYYID_QUTB_TENTANG_PEMERINTAHAN (1).pdf,” t.t.